



Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengevaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Asira Damayanti¹, Khairati², Qurra Aitul Aini³, Dina Salsabila⁴, Mohamad djasuli⁵

^{1,2,3,4,5} Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Received: 3 September 2024
Revised: 13 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dianalisis dari LRA tahun anggaran 2021-2023. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021-2023 efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan cukup efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.

Kata kunci: *efektivitas, efisiensi, kinerja keuangan.*

(*) Corresponding Author:

¹asiradamayanti4@gmail.com, ²khairati1805@gmail.com,

³qaini397@gmail.com, ⁴salsabiladina833@gmail.com,

⁵djasuli@trunojoyo.ac.id

How to Cite: Azalia, A., Hanifah, M., & Rasudin, N. (2024). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 18-27. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11281>

PENDAHULUAN

Saat ini dengan waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, badan umum milik negara atau daerah, dan organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa sebelumnya. Sektor publik memiliki tugas dan fungsi tersendiri yang dapat dijalankan oleh sektor swasta seperti menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik yaitu layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan lain sebagainya tetapi dalam tugas tertentu sektor swasta tidak dapat menggantikan posisi sektor publik seperti fungsi birokrasi pemerintah. Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan pendapatan pajak lainnya, dimana kegiatannya sudah diatur dari peraturan Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585 2 yang berlaku (Rai, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta

semakin dipertegas melalui Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas dan efisien diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya langka dari organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien pada ayat (5) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu entitas pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Efektivitas pengelolaan keuangan di dalam Dinas Kesehatan menjadi kunci utama dalam memastikan alokasi dana yang tepat guna dan hasil yang maksimal dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan adalah analisis laporan realisasi anggaran. Analisis laporan realisasi anggaran merupakan sebuah pendekatan yang sistematis untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan suatu entitas, dalam hal ini Dinas Kesehatan akan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Li et al. (2019) menemukan bahwa analisis realisasi anggaran memungkinkan pengelolaan dana yang lebih efektif dan strategis, memprioritaskan alokasi sumber daya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya penggunaan data anggaran yang akurat dan terperinci dalam mengambil keputusan terkait dengan alokasi sumber daya di bidang Kesehatan. Wang dan Chen (2020) menyoroti aspek efisiensi dalam pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan melalui analisis laporan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data yang dihasilkan dari laporan realisasi anggaran, lembaga pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan dana publik.

Laporan pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara. Anggaran negara adalah tulang punggung pemerintahan. Upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendanaan dari potensi daerah serta kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber pendanaan yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memainkan peranan penting sebagai alat untuk stabilisasi dan alokasi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, serta evaluasi kinerja.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari beberapa format yaitu pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, pendapatan pinjaman, belanja pinjaman, jumlah pinjaman bersih dan sisa kenaikan/penurunan pinjaman anggaran

(SILPA/SIPKA). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan pelaksanaan anggaran memberikan perbandingan anggaran dan pelaksanaannya selama periode pelaporan. Penting untuk membandingkan anggaran dan pelaksanaannya untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kesehatan Bangkalan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan dan analisis belanja. Secara umum analisis pendapatan dan belanja daerah Dinas Kesehatan Bangkalan dapat diperoleh dari laporan realisasi anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Bangkalan.

Dalam menganalisis Laporan Realisasi Anggaran digunakan alat analisis rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara pendapatan dan belanja yang menggambarkan bagaimana dinas Kesehatan kabupaten bangkalan memprioritaskan dananya pada pendapatan dan belanja secara optimal dan berguna untuk menunjukkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh dinas Kesehatan kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis laporan realisasi anggaran dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan pada dinas Kesehatan kabupaten bangkalan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan mengungkapkan suatu keadaan atau kejadian yang sedang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Bangkalan dimana semua data, dokumen, wawancara yang diperoleh dari objek penelitian tersebut dikemukakan, dijelaskan secara kualitatif berupa uraian kata-kata. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Bangkalan yaitu wawancara secara langsung dan yang menjadi data sekunder adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Bangkalan Tahun Anggaran 2021-2023.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau memnggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan PAD dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka penerimaan PAD dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka penerimaan PAD dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka penerimaan PAD dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka penerimaan PAD dikatakan tidak efektif

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antaran anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 januari samapai dengan 31 desember 2021-2023.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2021	3.421.500.000,00	3.850.421.243,29	Sangat Efektif	112,54
2022	56.767.404.755,00	54.818.665.866,92	Efektif	96,57
2023	69.244.631.867	67.842.275.541,74	Efektif	96,82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2021-2023, tingkat efektivitas penerimaan PAD bersifat tidak stabil dari tahun ke tahun, karena Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan kota Bangkalan memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah cukup tinggi dengan tingkat efektifitas sangat efektif yakni sebesar 112,54% Namun, pada tahun 2022 Pendapatan asli daerah di dinas Kesehatan Kota Bangkalan mengalami penurunan menjadi 96,57%, sedangkan

pada tahun 2023 Pendapatan asli daerah di dinas Kesehatan Kota Bangkalan mengalami peningkatan sebesar 96,82%, dan dapat disimpulkan dari tahun 2022 – 2023 untuk tingkat efektivitasnya sama yaitu di tingkat efektif.

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2021	247.818.321.522,00	211.381.793.066,36	Cukup Efisien	85,30
2022	233.952.821.970,00	188.396.943.072,12	Cukup Efisien	80,53
2023	238.863.332.560	218.693.670.237,45	Kurang Efisien	91,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja di tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kota Bangkalan yakni cukup efisien dengan nilai kriteria 85,30 %. Pada Tahun 2021 tingkat efisiensi anggaran belanja di Dinas Kesehatan Kota Bangkalan yakni cukup efisien dengan nilai kriteria 80,53 %. Sedangkan di Tahun 2023 merupakan tingkat tertinggi ketidak efisiensinya pelaksanaan anggaran belanja di dinas Kesehatan kota bangkalan yakni mencapai hingga 91,56%.

PEMBAHASAN

Laporan realisasi anggaran membandingkan rencana anggaran dengan pengeluaran aktual selama periode tertentu. Laporan ini mencerminkan sejauh mana organisasi atau perusahaan berhasil mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan dalam laporan realisasi anggaran. Dengan menganalisis perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan yang sebenarnya, manajemen dapat mengidentifikasi trend, evaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan, serta membuat keputusan yang lebih tepat untuk masa depan.

Berdasarkan Penilaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan kota bangkalan, Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan Dinas Kesehatan kota bangkalan menggunakan alat ukur rasio efektivitas dan efisiensi, maka diperoleh tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Kesehatan Kota Bangkalan tahun anggaran 2021-2023 bisa dikatakan efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi dan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

Efektivitas Anggaran Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektivitas Anggaran menggambarkan kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan realisasi yang ada. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan realisasi anggaran yang semakin baik. Adapun perhitungan efektivitas anggaran berdasarkan angka - angka pada laporan realisasi anggaran tahun 2021-2023 di Dinas Kesehatan Kota Bangkalan dengan hasil perhitungan dari rasio dapat

diketahui bahwa efektifitas realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2021 adalah 112,54% , tahun 2022 adalah 96,57%, tahun 2023 adalah 96,82%.

Efisiensi Keuangan Anggaran Belanja Rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja) satu periode dengan anggaran yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik. Adapun perhitungan efisiensi keuangan di Dinas Kesehatan Kota Bangkalan, dengan hasil perhitungan dari rasio ini dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi realisasi belanja pada tahun 2021 yaitu 85,30%, tahun 2022 adalah 80,53 tahun 2023 adalah 91,56 %.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menerapkan basis akrual. Basis akrual adalah metode akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penerapan basis akrual ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan menggunakan basis akrual, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, memberikan informasi yang lebih relevan kepada pemangku kepentingan.

Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan juga menjadi fokus utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Sistem pengendalian internal yang baik memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan memberikan informasi yang layak dan dapat dipercaya mengenai pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Informasi yang disajikan secara cepat, tepat, dan terbuka kepada masyarakat menjadi prioritas untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan dan penilaian kinerja pemerintah daerah, menciptakan lingkungan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas juga menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan secara proporsional kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan sarana publik yang memungkinkan masyarakat untuk menilai pencapaian kegiatan dan pelaksanaan program secara langsung. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif dan berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan pengeluaran. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi staf keuangan dilakukan secara rutin untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi fokus Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan dan pelaporan anggaran dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap realisasi anggaran dan pengeluaran, serta memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan juga mengedepankan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan keuangan. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat meningkatkan akurasi dan relevansi anggaran yang disusun. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian kinerja juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Dengan berbagai upaya tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Dinas Kesehatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik juga melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Kebijakan yang disusun harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dengan kebijakan yang tepat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sebagai bagian dari komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan juga aktif dalam melaporkan kinerja keuangan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Laporan keuangan yang disusun secara berkala memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan, serta memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat dan pihak terkait. Hal ini juga membantu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan segala upaya yang dilakukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan terus berusaha untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, inovasi dalam pengelolaan keuangan, dan pendekatan partisipatif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, Dinas Kesehatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021-2023 sangat efektif dan efektif dari tahun ke tahun.
2. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan cukup memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektifitas diatas 100%.
3. Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021-2023 secara keseluruhan cukup efisien dari tahun ke tahun.
4. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan cukup mengefisienkan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

Saran dari penelitian ini sebagai dasar pertimbangan bagi pimpinan dan staff di Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yaitu lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP No. 03 Tentang *Laporan Arus Kas*.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP No. 04 *Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan*.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) Tentang *PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH*.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
Li, J., Zhang, H., & Tang, S. (2019). *Analysis of the realization of budgetary expenditures in public hospitals: Evidence from Shanghai, China*. PLoS ONE, 14(5), e0216594.
Wang, W., & Chen, Y. (2020). *Study on the Efficiency of Budgetary Expenditure Realization in Public Health Sector*. Journal of Healthcare Engineering, 2020.
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
Rai, I. G. N. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Alfabeta : Bandung.